

IMPLEMENTASI KELAS BILINGUAL DI SMP NEGERI 1 BATURETNO WONOGIRI

IMPLEMENTATION OF BILLINGUAL CLASS IN JUNIOR HIGH SCHOOL 1 BATURETNO WONOGIRI

Oleh: Tri Angga Dewi, Prodi Kebijakan Pendidikan, Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, putribapaknya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Proses perumusan kelas bilingual di SMP Negeri 1 Baturetno, (2) Implementasi kelas bilingual di SMP Negeri 1 Baturetno, (3) Faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan kelas bilingual di SMP Negeri 1 Baturetno.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang mempelajari masalah yang terjadi. Hasil analisis data berupa pemaparan tentang situasi yang terjadi dan berupa narasi. Subyek dari penelitian ini adalah wakil kepala sekolah, ketua program kelas bilingual, guru kelas bilingual, serta siswa kelas bilingual. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan teknik. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti, dengan menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Perumusan kebijakan kelas bilingual dibuat oleh warga sekolah, khususnya guru bahasa Inggris dan kepala sekolah atas rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten. (2) Implementasi kelas bilingual mencakup empat hal, yaitu komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang terjadi antara guru dengan siswa, sekolah dengan dinas terkait, dan komunikasi yang terjadi antar warga sekolah. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah guru dan warga sekolah yang mendukung penyelenggaraan kelas bilingual. Disposisi yang dimaksud yaitu dukungan dan motivasi warga sekolah dalam penyelenggaraan kelas bilingual. Kemudian struktur birokrasi yang dimaksud adalah struktur organisasi dalam kelas bilingual. Implementasi tersebut berjalan cukup baik, hal tersebut terlihat dari proses pembelajaran yang menggunakan dua bahasa pengantar, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Akan tetapi, dalam proses pembelajaran tersebut masih terdapat guru yang mengalami kesulitan dalam penggunaan dua bahasa. Implementasi juga berjalan baik melalui berbagai kegiatan yang khusus dilakukan di kelas bilingual. kegiatan tersebut antara lain *outbound*, *outing class*, dan kunjungan ke kampung Inggris, Pare, Kediri. (3) Faktor pendukung implementasi kelas bilingual adalah semangat siswa yang tinggi, semangat guru yang tinggi, serta sarana prasarana yang memadai. (4) Faktor penghambat implementasi kelas bilingual adalah masih adanya guru yang kesulitan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Kata kunci: *Implementasi, Kelas Bilingual*

Abstract

This study aims to determine: (1) The formulation process of bilingual classes in SMP Negeri 1 Baturetno, (2) Implementation of bilingual classes in SMP Negeri 1 Baturetno, (3) Supporting and inhibiting factors in the implementation of bilingual classes in SMP Negeri 1 Baturetno.

The type of research was descriptive qualitative research that studies the problems which occurred. The results of data analysis were in the form of a presentation on the situation and the form of narration. The subjects of this study were the vice principal, chairman of bilingual classes program, bilingual classes' teachers, and students in bilingual classes. Data collection methods were observation, interviews, and documentation. Triangulations were triangulation of sources and techniques. The main

instrument in this study was researcher, using observation, interview, and documentation guidelines. Data analysis was data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

The results of this study were (1) The formulation process of bilingual classes was created by the school community, especially English teachers and principals based on the recommendation of the Dinas Pendidikan Kabupaten (District Education Office). (2) The implementation of bilingual classes includes four things, namely communications, human resources, disposition, and bureaucratic structure. The communication which was mentioned is a communication that occurs between teachers and students, schools with related agencies, and communication among the school community. Human resources were the teachers and the school communities that support the implementation of bilingual classes. In this case, the disposition was the support and motivation of school community in the implementation of bilingual classes. Then the bureaucratic structure was the organizational structure in bilingual classes. The implementation was going well; it can be seen from the process of learning by using two languages, English and Indonesian. However, in the learning process, there were teachers who have difficulty using two languages. The implementation also goes through some series of special activities which carried out in bilingual classes. The activities include outbound, outing class, and a visit to Kampung Inggris, Pare, Kediri. (3) The supporting factor in the implementation of bilingual classes was the students and teachers which are highly spirited, as well as adequate infrastructure. (4) The inhibiting factor in the implementation of bilingual classes was some teachers who have difficulty using English as the language of instruction.

Keywords: Implementation, Bilingual Classes

PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut berdasarkan pada tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat yang meningkat akan pendidikan yang lebih baik. Terlebih era global saat ini turut meningkatkan persaingan di dunia internasional dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek pendidikan. Hal tersebut secara tidak langsung menuntut adanya peningkatan sumber daya dan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Salah satu upaya yang pernah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan adanya program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Akan tetapi pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi

(MK) memutuskan untuk membubarkan sekolah RSBI dan SBI. Hal tersebut dikarenakan banyaknya permasalahan yang ditemukan dan dirasakan masyarakat tentang penyelenggaraan RSBI dan SBI tersebut.

Terlepas dari penghapusan RSBI dan SBI yang dinilai kurang baik oleh masyarakat umum, RSBI dan SBI telah membawa semangat untuk memajukan pendidikan yang lebih baik. Sebagai gantinya banyak sekolah melakukan inovasi untuk menggantikan kebijakan yang telah dihapuskan tersebut. Inovasi yang dilakukan oleh sekolah dibuat dengan berbagai pertimbangan, antara lain perkembangan zaman yang semakin modern dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih baik. Berbagai inovasi tersebut diterapkan melalui program dan kebijakan yang dibuat oleh sekolah.

Salah satu kebijakan yang banyak dibuat adalah penyelenggaraan kelas bilingual di sekolah reguler. Bilingual secara umum merupakan proses pembelajaran menggunakan dua bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kompetensi dasar siswa dikembangkan melalui pembelajaran bilingual terutama untuk mata pelajaran Matematika dan Sains.

Secara filosofi, program pembelajaran bilingual ditujukan untuk pembentukan aditif (pengayaan bahasa peserta didik terhadap bahasa yang sudah mereka kuasai) atau substraktif bilingual (penggantian bahasa satu dengan bahasa lain). Menurut Holmes dalam Margana (2009; 11) mengatakan bahwa program pembelajaran bilingual ditujukan untuk mempromosikan bilingualism dengan menggunakan bahasa pertama secara proporsional atau penggunaan dua bahasa sebagai bahasa pengantar pembelajaran untuk berbagai macam mata pelajaran. Sedangkan menurut Anderson and Boyer dalam Margana (2009; 10) menyatakan bahwa program pembelajaran bilingual merujuk pada penggunaan dua bahasa sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran.

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu (H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 2008: 140).

Kebijakan pendidikan ditujukan untuk peserta didik dan merupakan penjabaran visi-

misi pendidikan dalam masyarakat tertentu sehingga kebijakan pendidikan benar-benar dapat diimplementasikan.

Menurut H.A.R. Tilaar (2009:7), kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan-kebijakan pendidikan yang direncanakan tersebut dapat dicapai melalui lembaga-lembaga sosial (*social institutions*) atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Menurut Arif Rohman (2012:86) kebijakan pendidikan merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, umum maupun khusus, terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui sebuah proses politik untuk suatu arah tindakan, program, dan rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.

Menurut Thompson dalam Syafaruddin (2008: 118) suatu kebijakan sekolah dibuat oleh orang yang terpilih bertanggungjawab untuk membuat kebijakan pendidikan, dewan sekolah dan unsur lain yang diberi kewenangan membuat kebijakan, baik kepala sekolah, pengawas atau administrator yang memiliki kewenangan mengelola kebijakan dari dewan sekolah. Caldwell dan Spinks dalam Beare yang dikutip oleh Syafaruddin (2008: 123) menjelaskan bahwa suatu kebijakan sekolah adalah sebagai pernyataan tentang tujuan dan satu atau lebih petunjuk mengenai bagaimana sasaran dicapai dan

dilaksanakan bersama serta memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program sekolah.

Di SMP Negeri 1 Baturetno sejak tahun 2010 telah menyelenggarakan kelas bilingual. Dasar penyelenggaraan kelas bilingual disini berdasarkan kebutuhan masyarakat sekitar kecamatan Baturetno akan keberlanjutan kelas bilingual di salah satu sekolah dasar. Dengan latar belakang tersebut pihak sekolah kemudian menyusun rancangan untuk menyelenggarakan kelas bilingual yang kemudian diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Setelah mendapat respon dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dengan diberikannya surat rekomendasi maka SMP Negeri 1 Baturetno menyelenggarakan kelas bilingual tersebut.

Berbagai persiapan dilakukan pihak sekolah untuk memberikan hasil yang baik dalam penyelenggaraannya. Salah satunya mempersiapkan tenaga pendidik yang berkompeten dalam penyampaian materi menggunakan dua bahasa. Usaha yang dilakukan sekolah antara lain dengan pelatihan bahasa Inggris untuk tenaga pendidik. Pelatihan tersebut dilakukan pada awal penyelenggaraan kelas bilingual, untuk selanjutnya guru diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berbahasa secara mandiri.

Di sekolah ini memiliki 1 kelas bilingual dan 8 kelas regular di setiap angkatannya. Dalam satu kelas bilingual rata-rata berjumlah 24 siswa. Terdapat

beberapa perbedaan antara kelas bilingual dengan kelas regular. Beberapa perbedaan tersebut antara lain kelas yang ber-AC, proyektor, LCD dan beberapa fasilitas lainnya.

Beberapa program juga disusun dalam penyelenggaraan kelas bilingual. Program-program tersebut disesuaikan dengan materi pembelajaran serta berbagai kegiatan tambahan sebagai penunjang dalam meningkatkan wawasan siswa terlebih dalam pengembangan bahasa Inggris. Salah satu kegiatan wajib dalam kelas bilingual adalah *outing class*, yaitu kunjungan ke Desa Bahasa Pare di Kediri guna menambah pemahaman siswa tentang bahasa Inggris. Selain itu ada juga *outbound* yang dilaksanakan untuk menambah kekompakan siswa kelas bilingual. Berbagai kegiatan penunjang tersebut menjadi nilai plus dari kelas bilingual.

Proses penerimaan siswa baru di kelas bilingual juga mengalami berbagai perubahan selama lima tahun ini. Pada awal tahun PPDB dilaksanakan dengan syarat mengikuti test IQ dan test potensi akademik. Namun pada tahun ini terdapat perubahan pada proses PPDB, yaitu semua siswa yang mendaftar diterima dan melakukan test secara bersamaan. Pengelompokan kelas bilingual dilakukan setelah test potensi dilakukan sesuai dengan jumlah nilai yang didapat oleh siswa serta pertimbangan minat siswa dalam mengikuti kelas bilingual.

Respon yang baik dari masyarakat membuat pihak sekolah semakin mengembangkan program kelas bilingual ini. Hal tersebut dapat dilihat pada meningkatnya jumlah peminat dalam PPDB khususnya untuk kelas bilingual. Banyak orang tua siswa yang merasakan dampak positif dari penyelenggaraan kelas bilingual ini termasuk output yang dihasilkan kelas bilingual.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang melatarbelakangi peneliti untuk membahas masalah ini adalah untuk melihat dan mengetahui bagaimana implementasi program kelas bilingual di SMP Negeri 1 Baturetno.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana proses perumusan kebijakan kelas bilingual di SMP Negeri 1 Baturetno?”, “Bagaimana implementasi kelas bilingual di SMP Negeri 1 Baturetno?”, serta “Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kelas bilingual di SMP Negeri 1 Baturetno?”

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian bilingual adalah mampu atau biasa memakai dua bahasa. Dwi bahasa adalah kemampuan menggunakan dua bahasa. Secara teoritis, pemahaman program bilingual dengan program imersi hampir sama. Kelas bilingual merupakan kelas yang memiliki model pembelajaran menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penerapan pembelajaran bilingual difokuskan pada mata pelajaran MIPA. Dalam proses pembelajaran kelas bilingual tetap menggunakan kurikulum nasional yang berlaku.

Secara filosofi, program pembelajaran bilingual ditujukan untuk pembentukan aditif (pengayaan bahasa peserta didik terhadap bahasa yang sudah mereka kuasai) atau substraktif bilingual (penggantian bahasa satu dengan bahasa lain). Menurut Holmes dalam Margana (2009; 11) mengatakan bahwa program pembelajaran bilingual ditujukan untuk mempromosikan bilingualism dengan menggunakan bahasa pertama secara proporsional atau penggunaan dua bahasa sebagai bahasa pengantar pembelajaran untuk berbagai macam mata pelajaran. Sedangkan menurut Anderson and Boyer dalam Margana (2009; 10) menyatakan bahwa program pembelajaran bilingual merujuk pada penggunaan dua bahasa sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran. Menurut May, dkk dalam Margana (2009: 10) program bilingual merupakan program pembelajaran yang menggunakan dua bahasa sebagai bahasa pengantar untuk berbagai isi kurikulum yang dipakai.

Terkait dengan program bilingual, setidaknya terdapat empat tujuan penerapan program bilingual antara lain: Proses pengayaan (*enrichment process*) bahasa, Asimilasi budaya dan pengetahuan, Isolasi (*segregation*), dan Pemertahanan bahasa.

Empat jenis tujuan program bilingual tersebut menentukan model pembelajaran yang diterapkan. Jika yang dipilih adalah proses pengayaan, maka proses pembelajaran menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa matrik dengan memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia jika guru dan peserta didik mengalami kesulitan dalam proses

pembelajaran. Jika tujuan yang dipilih adalah asimilasi, maka bahasa submerse yang diterapkan. Model ini mengharuskan guru dan peserta didik menggunakan bahasa Inggris secara eksklusif tanpa adanya toleransi untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran. Kemudian jika yang dipilih adalah model isolasi, maka bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia tanpa menggunakan bahasa Inggris. Jika yang dipilih adalah pemertahanan (*maintenance*), maka guru dan peserta didik menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara seimbang tanpa ada bahasa yang dominan digunakan.

Penerapan pembelajaran bilingual di Indonesia pada dasarnya cukup tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya sekolah yang mewujudkan kelas bilingual sebagai kelas unggulan.

Pendidikan bilingual memiliki dua tujuan, yaitu sebagai pengembangan bahasa Inggris secara akademik sebagai tujuan keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar dan sebagai wadah untuk melestarikan warisan bahasa.

Dasar program merujuk pada kekhasan pelaksanaan program yang ditentukan oleh beberapa hal, antara lain kurikulum yang digunakan, jenis bahasa pengantar yang digunakan, dan dominasi jumlah siswa terhadap bahasa yang dikuasai. Secara lebih jelas, May, dkk dalam Margana (2009; 14) menyampaikan beberapa model pelaksanaan program bilingual, yaitu submersi model program yang menitikberatkan pada penggunaan bahasa kedua dalam proses

belajar mengajar. Model ini berasumsi bahwa penggunaan bahasa pertama terlalu sering akan menghambat dalam penyerapan terhadap bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Model ini sering digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. *Sheltered Instruction* model ini disebut juga model imersi terstruktur. Model ini menawarkan mata pelajaran bahasa Inggris dan mata pelajaran lain digabung dan diajar oleh guru mata pelajaran terlatih atau tim pengajar yang terdiri dari guru bahasa Inggris dan guru mata pelajaran lain. Model *Transitional* model ini menggunakan bahasa pertama dalam proses belajar mengajar, setelah penguasaan bahasa Inggris dirasa memadai, maka penggunaan bahasa Inggris mulai ditekankan pada proses belajar mengajar. Model Imersi model ini menekankan pada pengayaan dan ditujukan pada pembentukan bilingualitas serta biliterasi. Pemertahanan Bahasa Tradisi model ini menekankan pada penggunaan dua bahasa secara bertahap. Mulai dari bahasa ibu, bahasa pertama, dan bahasa kedua. Bahasa target juga digunakan tetapi tanpa menghilangkan bahasa lokal. Imersi Dua Arah model ini melibatkan dua penutur bahasa, yaitu bahasa pertama dan bahasa kedua secara bersamaan dalam proses belajar. Model ini diarahkan pada pembentukan ketrampilan bilingualitas dan biliterasi bagi siswa yang memiliki latar belakang bahasa pertama yang berbeda-beda. Berdasarkan pada model diatas, model imersi satu arah lebih banyak diterapkan di berbagai negara.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan atau menggambarkan implementasi kelas bilingual di SMP Negeri 1 Baturetno Wonogiri secara terperinci.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Desember 2015. Dalam penelitian ini lokasi yang telah dijadikan sebagai sumber data penelitian adalah SMP Negeri 1 Baturetno Wonogiri.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah warga sekolah yang terdiri dari wakil kepala sekolah, ketua program kelas bilingual, guru kelas bilingual, serta siswa kelas bilingual. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah implementasi kelas bilingual di SMP Negeri 1 Baturetno.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis wawancara yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Peneliti telah menyusun pedoman wawancara secara lengkap, akan tetapi apabila terdapat pertanyaan yang dapat ditelaah lebih dalam dan menyangkut terhadap fokus penelitian peneliti akan melakukan pertanyaan tambahan untuk mengumpulkan sumber data penelitian.

Pengambilan dokumen dalam penelitian ini catatan peristiwa di SMP Negeri 1 Baturetno Wonogiri yang berupa data-data yang terangkum dalam data tertulis, foto serta segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi program sekolah ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan

triangulasi metode dan triangulasi pengumpulan data.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti menggunakan tiga bentuk instrumen yakni pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum dan menulis seluruh data yang peneliti peroleh dari lapangan dalam wujud uraian atau laporan terperinci. Laporan tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang penting, dan disusun secara sistematis.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Peneliti menyajikan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan secara lengkap, jelas dan singkat untuk memudahkan peneliti dalam memahami gambaran dan hubungan terhadap aspek aspek yang diteliti.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Verifikasi merupakan pengambilan kesimpulan dari data dan informasi yang sudah diperoleh sejak awal penelitian. Apabila peneliti menemukan data tambahan, maka data tersebut akan menjadikan kesimpulan menjadi lebih valid.

(Sugiyono, 2014:92)

Keabsahan Data

Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan teknik triangulasi agar didapatkan data yang valid dan reliabel. Teknik

trianggulasi yang dapat digunakan antara lain :

1. Trianggulasi Sumber

Trianggulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

(Moleong, 2014:320-321)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum SMP Negeri 1 Baturetno Wonogiri

Pada tanggal 1 Agustus 1964 berdiri salah satu sekolah di kecamatan Baturetno bernama SMEP (Sekolah Ekonomi Pertama) Negeri Baturetno dengan SK Pendirian No.393/B3/Kedj pada tanggal 09 September 1964. Seiring perkembangan pendidikan dan kebijakan pemerintah, mulai bulan Januari tahun 1977 SMEP Negeri Baturetno bertransisi menjadi SMP Negeri 1 Baturetno. SMP Negeri 1 Baturetno beralamat di Jalan Solo-Baturetno Tromol Pos No. 2 , Baturetno, Wonogiri

Saat ini SMP N 1 Baturetno memiliki akreditasi A yang diterbitkan pada tanggal 09 November 2010 dengan No.SK Akreditasi 202010310007.

Proses perumusan kebijakan kelas bilingual didasari pada kebutuhan masyarakat akan pendidikan berbasis bilingual. Pada awalnya sekolah mengajukan proposal untuk penyelenggaraan kelas bilingual yang disusun oleh kepala sekolah dan beberapa guru. Proposal yang telah dibuat kemudian diajukan ke Dinas

Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Pada tanggal 13 Maret 2009 dikeluarkan surat rekomendasi dengan nomor 425/091 perihal penyelenggaraan kelas bilingual. Dari surat rekomendasi yang diperoleh maka sekolah membuka satu kelas bilingual di setiap angkatan. Kelas bilingual diselenggarakan sejak tahun 2009.

Dalam implementasi kelas bilingual, komunikasi yang terjadi telah melibatkan berbagai pihak terkait yaitu guru, orang tua, masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung sekolah dasar oleh sekolah serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Sumber daya dalam implementasi kelas bilingual terdiri dari sumber daya manusia atau guru dan siswa, serta sumber dana atau finansial yang terdiri dari sumbangan orang tua serta beasiswa dari pemerintah, dan sarana prasarana yang cukup memadai. Disposisi yang terjadi dalam implementasi kelas bilingual cukup tinggi, terlihat dari motivasi warga sekolah dalam mendukung penyelenggaraan kelas bilingual. Struktur birokrasi dalam implementasi kelas bilingual terdapat di dalam struktur sekolah, tetapi tetap mempunyai kepengurusan sendiri yang terdiri dari ketua program, bendahara, dan wali kelas bilingual. Dari hasil pengamatan dan wawancara maka dapat diketahui bahwa implementasi kelas bilingual mencakup empat hal yaitu komunikasi yang diwujudkan melalui sosialisasi program serta komunikasi yang terjadi dalam lingkungan sekolah serta kelas bilingual, sumberdaya yang terdiri dari sumberdaya manusia, dana, dan sarana prasarana, disposisi yaitu adanya kemauan dan semangat warga sekolah menyelenggarakan program, dan struktur

birokrasi yang terdiri dari struktur organisasi dan peran warga sekolah.

Faktor pendukung dalam implementasi kelas bilingual di SMP Negeri 1 Baturetno, Wonogiri semangat warga sekolah dalam implementasi kelas bilingual dan sarana prasarana yang dimiliki sekolah sebagai penunjang implementasi kelas bilingual selain itu motivasi untuk berkembang cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan kemauan guru untuk mengikuti les bahasa Inggris dan belajar secara mandiri. Sedang faktor penghambatnya yaitu penyelenggaraan kelas bilingual jika diprosentasekan sebesar 10% saja, Kesulitan penggunaan bahasa Inggris yang dialami guru lebih pada pembuatan soal yang memang harus menggunakan dua bahasa. Selain itu penggunaan penguasaan bahasa pendamping oleh guru yang masih kurang hingga saat ini.

Pembahasan

1. Proses Perumusan Kebijakan Kelas Bilingual

Perumusan kebijakan kelas bilingual di SMP Negeri 1 Baturetno ini didasari pada kebutuhan masyarakat dan kemampuan sekolah untuk bersaing. Pada awal perumusan, sekolah ingin berkembang menjadi RSBI, tetapi karena adanya kekurangan pada lahan sekolah maka sekolah memutuskan untuk menyelenggarakan kelas bilingual. Selain itu motivasi guru dan siswa yang tinggi juga menjadi faktor yang mendukung sekolah dalam implementasi kelas bilingual.

Dalam proses perumusan kelas bilingual, sekolah direkomendasikan oleh Irjen dari Jakarta untuk meningkatkan kualitas sekolah

melalui program bilingual. Setelah itu, sekolah merumuskan program kelas bilingual dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Dengan diberikannya surat rekomendasi, maka sekolah menyelenggarakan kelas bilingual hingga saat ini.

2. Implementasi Kelas Bilingual

Perumusan kebijakan kelas bilingual di SMP Negeri 1 Baturetno ini didasari pada kebutuhan masyarakat dan kemampuan sekolah untuk bersaing. Pada awal perumusan, sekolah ingin berkembang menjadi RSBI, tetapi karena adanya kekurangan pada lahan sekolah maka sekolah memutuskan untuk menyelenggarakan kelas bilingual. Selain itu motivasi guru dan siswa yang tinggi juga menjadi faktor yang mendukung sekolah dalam implementasi kelas bilingual.

Desakan masyarakat untuk memberikan keberlanjutan sekolah berbasis bilingual juga menjadi pertimbangan sekolah, karena adanya sekolah dasar dengan konsep bilingual. Setelah itu, sekolah merumuskan program kelas bilingual dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Dengan diberikannya surat rekomendasi, maka sekolah menyelenggarakan kelas bilingual hingga saat ini.

Keberhasilan suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh berbagai variabel. Menurut teori George C. Edwards III (1980) (Subarsono 2008: 90) terdapat empat variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan atau program yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.

Variabel pertama adalah komunikasi. Implementor harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Dalam implementasi kelas bilingual ini, komunikasi terjadi melalui sosialisasi pada masyarakat, komunikasi antara guru dan siswa, serta komunikasi warga sekolah. Sosialisasi dilakukan pihak sekolah dengan mendatangi sekolah dasar di lingkungan Kecamatan Baturetno. Sosialisasi dilakukan khususnya pada siswa sekolah dasar kelas VI dan guru-guru serta orang tua. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan oleh siswa kelas bilingual secara mandiri, sehingga informasi tentang kelas bilingual dapat disebarluaskan.

Komunikasi juga terjadi antara guru dan siswa. Dalam proses belajar mengajar baik didalam kelas maupun diluar kelas, komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa terlihat cukup baik. Hal tersebut terlihat dari kedekatan guru dengan siswa. Sikap siswa bilingual yang aktif juga menjadi faktor penting dalam proses komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa. Komunikasi antar warga sekolah komunikasi yang terjadi biasanya mencakup pelaksanaan kelas bilingual serta masalah-masalah yang terjadi dalam kelas bilingual.

Variabel kedua adalah sumberdaya. Sumberdaya dalam implementasi kelas bilingual terdiri dari sumberdaya manusia, sumberdaya dana, dan sumberdaya sarana prasarana. Sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan kelas bilingual didukung dengan adanya pelatihan bahasa dan pengembangan diri guru. Pelatihan bahasa Inggris hanya dilakukan pada awal

penyelenggaraan saja, untuk mempersiapkan guru dalam hal penggunaan bahasa Inggris, tetapi hal tersebut tidak berlanjut sehingga guru harus berkembang sendiri.

Sumberdaya dana didukung dengan adanya sumbangan dari orang tua untuk pemeliharaan fasilitas kelas bilingual serta kegiatan kelas bilingual.

Sumberdaya sarana prasarana di kelas bilingual dapat dilihat dari fasilitas kelas yang memang berbeda dari kelas reguler. Perbedaan ini berhubungan dengan dana yang dikeluarkan oleh orang tua dan sebagai fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran peserta didik kelas bilingual.

Variabel ketiga yaitu disposisi atau sikap dan watak. Sikap dan watak yang baik dari implementator menjadi modal penting dalam penyelenggaraan program. Warga sekolah memiliki kemauan untuk bersama-sama meningkatkan dan mendukung program kelas bilingual.

Variabel yang terakhir adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi dalam penyelenggaraan kelas bilingual mencakup struktur organisasi. Warga sekolah termasuk kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa turut berperan dalam implementasi kelas bilingual.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kelas Bilingual

Faktor pendukung dalam implementasi kelas bilingual cukup banyak, antara lain motivasi guru dan siswa yang tinggi, sarana prasarana yang menunjang, serta dukungan

dana dari orang tua. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa motivasi guru dan siswa yang tinggi mampu menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kelas bilingual.

Sarana prasarana yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Adanya laboratorium bahasa, laboratorium IPA, ruang kelas yang memadai, serta berbagai sarana lainnya mampu menjadi nilai plus bagi sekolah.

Dukungan dana dari orang tua tentunya menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan kelas bilingual. Hal tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelas bilingual yang berbeda dengan kelas reguler biasa serta untuk menunjang kegiatan kelas bilingual.

Selain faktor pendukung, tentunya terdapat faktor penghambat dalam proses implementasi kelas bilingual ini. Tidak banyak faktor penghambat dalam penyelenggaraan atau implementasi kelas bilingual. tetapi ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh pihak sekolah atau guru. Salah satunya adalah penggunaan dua bahasa yang sampai saat ini masih menjadi kendala bagi para guru. Tetapi kesulitan tersebut dapat diatasi oleh guru dengan adanya komunikasi yang baik serta keinginan guru untuk berkembang dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dicermati beberapa kesimpulan mengenai implementasi kelas bilingual dalam uraian sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan kelas bilingual didasari dari adanya kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berbasis bilingual.
2. Dalam implementasi kelas bilingual, komunikasi yang terjadi telah melibatkan berbagai pihak terkait yaitu guru, orang tua, masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung sekolah dasar oleh sekolah serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Sumberdaya dalam implementasi kelas bilingual terdiri dari sumberdaya manusia atau guru dan siswa, serta sumber dana atau finansial yang terdiri dari sumbangan orang tua serta beasiswa dari pemerintah, dan sarana prasarana yang cukup memadai. Disposisi yang terjadi dalam implementasi kelas bilingual cukup tinggi, terlihat dari motivasi warga sekolah dalam mendukung penyelenggaraan kelas bilingual. Struktur birokrasi dalam implementasi kelas bilingual terdapat didalam struktur sekolah, tetapi tetap mempunyai kepengurusan sendiri yang terdiri dari ketua program, bendahara, dan wali kelas bilingual.
3. Faktor pendukung dalam implementasi kelas bilingual adanya sarana prasarana yang memadai, keuangan atau finansial, dan motivasi warga sekolah khususnya guru dan siswa. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kelas bilingual adalah kemampuan guru dalam menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar masih dirasa kurang sehingga penggunaan bahasa Inggris belum benar-benar optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari peneliti maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya pemeliharaan fasilitas yang lebih baik, karena masih terdapat kelas yang fasilitasnya tidak dapat digunakan atau rusak.
2. Sosialisasikan lagi program kelas bilingual ke sekolah dasar dan masyarakat agar kelas bilingual berkembang lebih baik.
3. Adanya pelatihan atau program khusus bagi guru kelas bilingual dalam meningkatkan kemampuan dalam menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pendamping.
4. Adanya seleksi bagi guru khusus kelas bilingual agar guru dapat mendidik secara lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman. (2001). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Mediatama Yogyakarta.
- (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang
- Lexy J. Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Margana & Siti Sudartini. (2009). *Pengembangan Model Pembelajaran Bilingual Untuik Sekolah Menengah Kejuruan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: UNY
- Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik. Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.(2014). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan : Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tilaar, H.A.R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan : Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar